



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUKHARI**
2. Jabatan : **KEPALA STASIUN**
3. NHK : **742028**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.181.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/102 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 440.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
3. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA BENER MERIAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA BENER MERIAH, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 97.000.000**

1. MOBIL, NEW AVANZA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ----****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 6.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.284.000.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.284.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YENNI AFRIANTI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 879811

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	260.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	135.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	404.600.000
III. HUTANG	Rp.	517.933.071
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-113.333.071

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SALMIAH**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMA**
3. NHK : **180218**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/144 m2 di KOTA BENGKULU
, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1550 m2/84 m2 di KOTA BENGKULU
, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.600.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 4.800.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 4.800.000
3. MOBIL, INNOVA TYPE G LUXURY Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 195.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 210.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 87.850.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.622.450.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.622.450.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG IRAWAN**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **623061**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/56 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	56.500.000
1. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA LI Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.350.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	214.850.000
III. HUTANG	Rp.	43.399.999
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	171.450.001

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BRAM SUMANTRI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **859688**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 265.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.676.846

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 282.676.846

III. HUTANG Rp. 358.948.509

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -76.271.663

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.